



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS TADULAKO

I. DATA PRIBADI

1. Nama : GOLAR
2. Jabatan : DEKAN
3. NHK : 422040

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 830.000.000

1. Tanah Seluas 2401 m2 di DONGGALA, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
2. Tanah Seluas 696 m2 di DONGGALA, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
3. Tanah Seluas 200 m2 di MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 186 m2/36 m2 di KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 210 m2/226 m2 di KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 295.000.000

1. MOBIL, HONDA HONDA HRV RU1 1.5 E CVT CKD Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOTOR, YAMAHA 2DP NON ABS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 185.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 45.040.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.355.040.000

III. HUTANG Rp. 361.200.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 993.840.000



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.